PENEGAKAN HUKUM KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HR BUKHARI MUSLIM DAN PERSPEKTIF UU NO 31 TAHUN 1999

Fathir Putra Maulud, Tajul Arifin

Ilmu hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati

putramaulud12@gmail.com, Tajularifin64@gmail.com

ABSTRACT: Corruption is an extraordinary crime, the impact of criminal acts of corruption in destroying democratic values, morality, causing harm to state finances, violating the social and economic rights of the community and posing a threat to the ideals of a just and prosperous society, in Indonesia there are The three law enforcement agencies that have the authority to handle cases of criminal acts of corruption are the police, the prosecutor's office and the Corruption Eradication Commission. The rampant criminal acts of corruption in the country are not only detrimental to state finances but are a violation of the social and economic rights of society at large, corruption is no longer a problem. Nationally, one of the efforts that can prevent Indonesia's decline due to corruption is to make efforts to confiscate and return assets resulting from criminal acts of corruption based on statutory law. The prosecutor's office has the authority to handle cases of criminal acts of corruption, criminal acts of corruption in Indonesia have become widespread in society, the development continues to increase from year to year, both in terms of the number of cases that occur and the amount of state financial losses as well as in terms of the quality of criminal acts in a country with a majority Muslim population. , the problem of corruption cannot be truly resolved without a good understanding and awareness of its dangers, as explained in several hadiths as sources of Islamic law. This article aims to carefully examine the prohibition of acts of corruption according to the hadith of Bukhari and Muslim

Key words: law, hadith, society

ABSTRAK: Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dalam merusak nilai nilai demokrasi, moralitas, merugikan keuangan negara, pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merupakan ancaman terhadap cita cita menuju masyarakat adil dan makmur, di Indonesia terdapat tiga lembaga penegak hukum yang berwenang menangani kasus tindak pidana korupsi yakni kepolisian, kejaksaan dan KPK. tindak pidana korupsi yang merajalela ditanah air tidak hanya merugikan keuangan negara saja tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional, salah satu upaya yang dapat menghindarkan keterpurukan indonesia akibat korupsi tersebut adalah melakukan upaya perampasan dan pengembalian terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang di dasarkan pada perundang undangan. Kejaksaan berwenang menangani kasus tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana Dalam suatu negara dengan mayoritas penduduk Islam, persoalan korupsi tidak dapat benar-benar teratasi tanpa pemahaman yang baik dan kesadaran akan bahayanya, seperti yang dijelaskan dalam beberapa hadis sebagai sumber hukum Islam. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dengan cermat larangan tindakan korupsi menurut hadist Bukhari dan Muslim

Kata kunci: Hukum, Hadist, Masyarakat

PENDAHULUAN

Korupsi adalah sebuah kata yang sudah umum didengar oleh semua orang, terutama karena banyaknya pemberitaan di media televisi dan sosial. Tindakan korupsi, yang mengacu pada pelanggaran tugas resmi demi keuntungan pribadi atau kelompok, termasuk dalam kategori tindak pidana yang merugikan negara dan ekonomi. Kasus korupsi di Indonesia masih menjadi masalah yang sulit diatasi hingga saat ini. Penegakan hukum korupsi berbeda dengan tindak pidana lainnya. Melibatkan dalam proses pengadilan. Penegakan pidana korupsi adalah sesuatu yang perlu menjadi fokus utama karena dampaknya yang merugikan secara sistemik, mencakup ekonomi dan hak-hak masyarakat. Apalagi, korupsi di Indonesia seperti virus yang sulit dikendalikan dan mengganggu kehidupan sosial. Langkah-langkah pemerintah untuk membentuk lembaga antikorupsi juga menjadi sorotan. Korupsi, sebagai tindak pidana yang tak terpisahkan dari masalah negara dan orang-orang berkedudukan tinggi, memengaruhi penegakan hukum pidana dengan melibatkan substansi, struktur, dan budaya hukum. Tindakan korupsi, yang melibatkan penggunaan kekuasaan, kewenangan yang diperoleh dari jabatan atau kedudukan, dianggap sebagai tindak pidana. Dalam perspektif Islam, korupsi dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

METODE

penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data secara ilmiah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Untuk mengevaluasi kualitas hadist secara menyeluruh, penulis mengutip pandangan ulama hadist yang telah melakukan penelitian sebelumnya, dan melakukan penelusuran lebih lanjut terkait sanadnya. Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan seperti bahasa, historis, sosial, sosiohistoris, antropologis, atau psikologis untuk memahami hadist Nabi. Tahapan penelitian meliputi takhrij hadist dan mengutip syarh hadist oleh ulama terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN¹

Korupsi memiliki dampak negatif ini terkait dengan pelanggaran hukum, norma, dan moral, serta dapat terjadi dalam bentuk transaksi atau pemerasan. Korupsi juga dapat terjadi di lingkungan birokrasi, yang sering disebut sebagai petty corruption, sementara secara umum diartikan sebagai kebusukan, keburukan, atau kebejatan. Definisi etimologis korupsi berasal dari *Corruptio* yang mengandung makna kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dan menyimpang dari norma moral, seperti yang tercatat dalam *The Lexion Webster Dictionary*. Dari sini, kata-kata tersebut menyebar ke berbagai bahasa Eropa dan kemudian turun ke bahasa Indonesia. Korupsi, dalam arti yang luas, merujuk pada penyewangan jabatan untuk keuntungan pribadi. Dapat disimpulkan korupsi adalah masalah yang besar dan belum terselesaikan dengan baik di Indonesia, melibatkan penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan untuk keuntungan pribadi atau korporasi, merugikan negara dan ekonomi. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penggelapan, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan kriminal lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan korupsi antara lain adalah kurangnya gaji pegawai, masalah manajemen, modernisasi, tekanan mental, dan kombinasi berbagai faktor lainnya. Pendidikan antikorupsi sejak dini dianggap sebagai salah satu strategi yang dapat mengurangi korupsi. Dengan pendidikan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami tindakan korupsi dan dampaknya, serta berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dampak negatif korupsi, seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya

¹ DEFINISI KORUPSI

kemiskinan, dan menurunnya investasi, menunjukkan pentingnya kesadaran dan edukasi terhadap korupsi bagi Masyarakat

A.KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM HR BUKHARI MUSLIM

Saat ini, walaupun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, ironisnya tingkat korupsi masih tinggi. Meskipun korupsi dilarang dalam ajaran Islam dan agama lainnya, tindakan korupsi yang terjadi belum mengancam langsung kehidupan kita. Namun, kurangnya kesadaran dan partisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi dapat mengarah pada kerusakan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Salah satu hadis yang dijadikan dasar dalam Islam, meski tidak secara eksplisit membahas korupsi, mengilustrasikan pentingnya menegakkan hukum sebagai upaya untuk mencegah kerusakan yang lebih luas. Dalam konteks hukum Islam, korupsi masuk dalam kategori tindak pidana yang berat, namun penerapan hukuman ta'zir memberikan ruang bagi penilaian subjektif hakim yang dapat mengakibatkan ketidakadilan, meskipun kata 'korupsi' tidak disebutkan secara langsung, konsep ini dapat dimasukkan ke dalam kategori pencurian yang memiliki hukuman yang tegas, seperti potong tangan. Dengan demikian, upaya untuk mencegah penyimpangan korupsi perlu dipertegas dan di dasari dengan hukum yang baik dan juga penerapan sanksi yang konsisten

perspektifnya terhadap penegakan hukum korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam hadis HR Bukhari dan Muslim, menekankan bahwa korupsi adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama dan tidak sesuai dengan kepentingan umat. Islam mengecam korupsi dan mendukung upaya pencegahan serta peran pendidikan dalam membentuk nilai dan budaya masyarakat. Dari sudut pandang hukum Islam, korupsi dapat disebut dengan penyimpangan dan menghasilkan dampak negatif yang luas di masyarakat.

²Penegakan hukum terhadap korupsi dalam konteks hukum Islam mencakup berbagai sanksi yang disesuaikan dengan tujuan syariat, kepentingan masyarakat, situasi, kondisi lingkungan, dan kondisi pelaku korupsi. Sanksi-sanksi tersebut termasuk dalam hukum pidana Islam seperti pidana Qishash, diyat, pidana mati, penyaliban, rajam, potong tangan atau kaki, pengusiran, dan penjara seumur hidup. Perlu diingat bahwa korupsi adalah

dalam perspektif hukum Islam mempertimbangkan ketentuan dan bentuk-bentuk pidana ta'zir, yang dapat menjadi alternatif model sanksi hukuman untuk kasus korupsi di Indonesia. Pembaruan atau penyempurnaan peraturan terkait pemberantasan korupsi dapat mengakomodasi model ketentuan pidana ta'zir, dengan mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat dan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat fleksibel. tindakan yang serius yang sedang dalam upaya pemberantasan, dan contoh penegakan hukum dalam hal ini adalah sangat penting untuk dicontohkan. Korupsi, sebagai tindakan yang melanggar hukum, belum sepenuhnya ditangani dengan pendekatan hukum Islam di Indonesia, meskipun pandangan dari perspektif hukum Islam mengenai korupsi sangat jelas. Hadis Rasulullah saw dalam HR Bukhari Muslim menyebutkan bahwa korupsi dianggap sebagai tindakan haram yang serupa dengan ghulu'l, yang merupakan penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh sesuatu yang tidak seharusnya. Sanksi pidana dalam hukum Islam, termasuk hukuman mati, disesuaikan dengan keadaan dan kondisi individu yang bersangkutan, dengan pertimbangan kemungkinan untuk memperbaiki diri melalui taubat. Hukum Islam termasuk dalam klasifikasi ilmu pengetahuan Proses penemuan hukum dilakukan melalui dengan tidak keluar dari kedua sumber tersebut. Ushul fiqh menggarisbawahi syarat-syarat dan metodologi tertentu,

Tekstualitas hukum Islam bukan tertutup, melainkan terbuka dengan batasan tertentu. Metodologi seperti ijtihad, qiyas, istihsan, mashalih mursalah, digunakan dalam mencari hukum Islam. Ada tradisi dan inovasi dalam pidana Islam seperti qishash, diyat, mati, penyaliban, rajam,

² Korupsi dalam perspektif hukum islam dan hr bukhari dan muslim

dan lainnya. Pemberlakuan hukuman mati untuk koruptor tidak tabu dalam Islam, namun sulit diterapkan dalam hukum positif Indonesia karena faktor penegak hukum. Nilai-nilai Islam mengenai hukuman mati untuk koruptor harus diapresiasi dalam hukum positif Indonesia.

Ada variasi bentuk-bentuk pidana Islam serta adanya inovasi dalam penafsiran atau pengembangan bentuk-bentuk tersebut. Bentuk-bentuk tradisional tersebut mencakup pidana Qishash untuk jiwa dan badan, pidana diyat, pidana mati, pidana penyaliban, pidana rajam. Ada ruang untuk pengembangan bentuk-bentuk pidana tambahan sebagai hasil dari takzir. Pidana-pidana ini dapat dikelompokkan berdasarkan objek ancumannya seperti jiwa, harta kekayaan, anggota badan, kemerdekaan, rasa kehormatan, dan keimanan, serta berdasarkan bahaya kejahatan yang diancamnya seperti pidana qishash dan diyat, pidana hudud, dan pidana takzir.

Penerapan hukum pidana ta'zir dalam konteks penegakan hukum di Indonesia memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam seperti hukuman hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana yang bersifat jahat, perlunya unsur kesengajaan dalam perbuatan pidana, serta perlunya kepastian dalam penegakan hukuman. Selain itu, faktor-faktor seperti kemaslahatan umat, efek jera yang tidak berlebihan, kesesuaian hukuman dengan kejahatan, dan keadilan bagi semua golongan juga menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman ta'zir. Penerapan esensi pidana ta'zir dalam perbaikan sistem pidana korupsi bertujuan untuk menyamakan esensi pidana yang berkaitan dengan korupsi seperti penggelapan, suap, pengambilan paksa, pengkhianatan, pembegalan, pungutan liar, penipuan, dan gratifikasi, meskipun memiliki proses dan bentuk yang berbeda-beda, semuanya termasuk dalam kategori pidana ta'zir. Penerapan sanksi hukuman pidana ta'zir dalam konteks penegakan hukum di Indonesia mengacu pada fleksibilitas karakter jarimah ta'zir yang mencakup berbagai bentuk hukuman, seperti nasihat, ancaman, pencegahan, hingga hukuman fisik dan pemidanaan. Hakim atau penguasa bertanggung jawab dalam menetapkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan dan keadaan pelaku, dengan mempertimbangkan⁴ kepentingan umum, efektivitas, keadilan, dan tanpa adanya pilih kasih. Namun, kewenangan ini tetap terikat pada undang-undang yang mengatur pidana ta'zir, sehingga dalam konteks pelaksanaannya, penggunaan hukum ta'zir harus mempertimbangkan beberapa aspek penting seperti kemaslahatan umat, efek jera yang tidak merugikan masyarakat secara luas, keseimbangan antara kejahatan dan hukuman, serta keadilan yang merata untuk semua golongan. Esensi pidana ta'zir yang dapat dimasukkan ke dalam pembaharuan hukum pidana korupsi meliputi berbagai bentuk jarimah yang serupa dengan tindak korupsi, seperti penggelapan, suap, dan perampokan, meskipun berbeda dalam cara dan proses pelaksanaannya, semuanya termasuk dalam kategori pidana ta'zir. Tidak menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dalam menetapkan sanksi hukuman. Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan hukum yang tepat dalam melakukan penurunan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Dalam rangka menangani Upaya penurunan kasus korupsi, hukuman takzir dapat disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku. Contohnya adalah:

- a. Hukuman Celaan dan Peringatan, yang diberikan kepada pelaku yang dianggap merugikan orang lain meskipun tindakannya dianggap ringan. Peringatan ini dimaksudkan sebagai upaya mendidik dan memberikan ancaman hukuman lebih berat jika pelaku mengulangi perbuatannya.
- b. pada pelaku memberikan bukti palsu dan kecurangan dengan mengumumkan kejahatan mereka secara publik.
- c. Menjauhkan dari Pergaulan Sosial, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap tiga sahabatnya sebagai hukuman.
- d. Pemecatan dari Jabatan, diberlakukan pada pelaku yang menjabat di sektor publik.
- e. Hukuman Fisik seperti Dera atau Cambuk, bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

³ Penegakan hukum korupsi berdasarkan perspektif hukum Islam hr Bukhari dan Muslim

⁴ Korupsi dalam perspektif hukum Islam dan hr Bukhari Muslim

- f. Hukuman Berupa Harta dan Fisik, contohnya mengganti nilai barang yang diambil dua kali lipat dan mendapat hukuman.
- g. Penjara, baik jangka pendek maupun seumur hidup, sesuai dengan kesepakatan dari ulama.
- h. Hukuman Mati, diterapkan dalam situasi genting atau krisis negara.

Dengan mempertimbangkan variasi hukuman takzir ini, penanganan terhadap pelaku korupsi dapat dilakukan mulai dari tindakan sederhana hingga tingkat terberat, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang dihasilkan

Beberapa cara tindakan sosial yang diarahkan kepada pelaku untuk menanggung jawaban atas perbuatannya:

1. Pengucilan kepada pelaku karena memanfaatkan harta korupsi, dianggap mirip dengan mengonsumsi barang yang diharamkan.
2. Tidak menerima kesaksian dari pelaku korupsi, misalnya dalam proses hukum di pengadilan atau dalam penetapan awal bulan Ramadan/Syawal, sesuai dengan larangan hadis yang menyatakan bahwa kesaksian dari orang yang berkhianat tidak diterima.

Sanksi sosial ini menjadi penting untuk memberikan dampak yang serius terhadap pelaku korupsi dan mengingatkan masyarakat tentang kejahatan korupsi serta keberlawanan etika agama terhadapnya. Dalam hukum syari'ah, perbuatan korupsi tetap dapat dipidana melalui sistem pidana takzir yang ada dalam syari'ah Islam, yang memberikan kewenangan pemidanaan kepada penegak hukum untuk mengkriminalisasi kejahatan seperti korupsi yang tidak ditentukan pidananya. Selain itu, Rasulullah saw juga melakukan tindakan preventif terhadap korupsi, seperti pemeriksaan terhadap pejabat setelah menjalankan tugasnya untuk memastikan pertanggungjawaban publik. Rasulullah saw juga menegaskan bahwa petugas yang melakukan korupsi akan menghadapi hukuman akhirat dan memberikan ancaman bahwa koruptor akan masuk neraka, memberikan efek psikologis yang menakutkan bagi masyarakat. Tindakan korupsi, Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukanlah perbuatan yang sama dengan penyimpangan pencurian yang disusun secara rinci lingkup hukum syariah. dengan itu , tindak pidana korupsi tetap harus mendapat hukuman yang sesuai, bahkan bisa sebanding atau lebih berat dari hukuman Qishash atau hadd. Syariah memberikan kewenangan kepada penguasa untuk menentukan hukuman yang tepat, asalkan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan prinsip-prinsip syariah yang umum. Dalam hukuman korupsi, variasi sanksi yang diberlakukan dipengaruhi oleh kejahatan yang berbeda-beda. Sanksi yang bisa diberikan. Alasannya adalah karena tidak ada hukum syariat yang secara langsung mengatur hal ini dalam nash qath'i. Artinya, hukuman dalam konteks ini bukanlah paket lengkap yang sudah ditetapkan oleh Allah swt. Selain itu, sanksi yang diterapkan termasuk dalam kategori ta'zir, di mana hakim memiliki kebebasan penuh untuk memilih sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas perlakuannya.

⁵Oleh karena itu, penentuan hukuman diberikan kepada hakim sebagai wakil pemerintah. Hakim harus mempertimbangkan tujuan syariat, kemaslahatan masyarakat, situasi sang koruptor, dan lingkungan sekitar dalam menetapkan hukuman agar dapat mencegah perbuatan korupsi di masa depan. Meskipun demikian, hukuman yang diberlakukan belum mampu mencapai efek jera yang diinginkan. MUI merekomendasikan hukuman mati bagi koruptor sebagai langkah serius dalam memberantas korupsi, seiring dengan usulan lain dari lembaga dan aktivis antikorupsi yang juga mendukung hukuman mati bagi koruptor⁶.

Namun yang perlu ditekankan adalah bahwa sanksi yang diberlakukan berlaku bagi pelaku pencurian dan korupsi, bukan bagi mereka yang melakukan tindakan tersebut. Pencuri dan

⁵ Penegakan hukum korupsi perspektif hukum islam dan hr bukhari muslim
Penegakan Tindakan korupsi dalam perspektif hukum islam dan hr bukhari muslim

koruptor merujuk kepada individu yang secara berulang kali melakukan perbuatan tercela ini. Dari perspektif logika, pelaku yang baru pertama kali mencuri atau melakukan korupsi tidak akan langsung mendapat sanksi berat, melainkan akan diberikan teguran keras sebagai pembelajaran.

7

Inilah yang menjadi perbedaan antara pelaku pencurian dan korupsi dengan orang yang melakukan perbuatan serupa untuk pertama kalinya. Ketika tindakan korupsi mencapai batas minimal yang telah ditetapkan, barulah koruptor dikenakan sanksi potong tangan. Namun, penting untuk dicatat bahwa sanksi potong tangan tidak selalu diartikan secara harfiah, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki beragam agama dan kepercayaan. "Memotong tangan" bisa diinterpretasikan sebagai hukuman yang mengurangi kemampuan pelaku, seperti hukuman penjara, konfiskasi harta kekayaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, hakim dalam konteks Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan kepada koruptor, tergantung pada faktor-faktor yang meringankan situasi tersebut.

Untuk mencegah korupsi dalam Islam, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, sistem penggajian harus diperbaiki agar aparat pemerintah dapat bekerja dengan baik tanpa tergoda untuk berbuat curang karena kebutuhan hidup mereka harus tercukupi. Kedua, dilarang menerima suap dan hadiah karena hal ini bisa mempengaruhi tindakan aparat pemerintah untuk memberi hadiah. Ketiga, perhitungan kekayaan dapat menjadi indikator korupsi, dan Keempat, pentingnya teladan dari para pemimpin yang bersih dari korupsi agar pemberantasan korupsi dapat berhasil. Terakhir, hukuman yang setimpal bagi koruptor juga menjadi faktor penting dalam mencegah korupsi, dan pengawasan dari masyarakat juga sangat membantu dalam memerangi korupsi. Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan korupsi dapat diatasi dengan efektif dalam masyarakat Islam.⁸

⁷ Penegakan hukum korupsi dalam perspektif hukum islam dan HR Bukhari Muslim

⁸ Penegakan hukum korupsi berdasarkan perspektif hukum islam dan hr bukhari muslim

B.PENEGAKKAN HUKUM BERDASARKAN PERSPEKTIF UU NOMOR 31 TAHUN 1999

Menurut UU, perilaku penyimpangan yang harus ditindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi mencakup perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan kewajiban atau mengganggu kepercayaan publik, dengan pelaku korupsi diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia melibatkan berbagai lembaga seperti Jaksa Negara, Polisi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara faktor-faktor seperti kurangnya pendidikan moral dan etika, perubahan lingkungan, dan faktor struktural seperti kurangnya keterstruktur pemerintahan dapat menjadi pemicu terjadinya korupsi. Solidaritas dan keterpaduan antara lembaga penegak hukum dianggap penting untuk kesuksesan penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, ada urgensi untuk memprioritaskan penyelesaian perkara korupsi dibandingkan dengan perkara lainnya, terutama dalam konteks peradilan pidana. Hal ini menimbulkan perdebatan antara pihak yang aktif dalam pemberantasan korupsi dan pihak yang ingin mempertahankan status quo. Upaya untuk menghambat pemberantasan korupsi sering terjadi karena korupsi dianggap sebagai tindak pidana luar biasa yang memerlukan langkah-langkah penanganan yang lebih intensif. Namun, instrument hukum yang dibentuk untuk hal ini harus tetap sesuai dengan standar universal yang berlaku. Unsur-unsur tindak pidana korupsi, yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, mencakup berbagai aspek terkait pelaku, tuntutan pidana terhadap korporasi, pelaksanaan hukuman, dan sebab-sebab terjadinya korupsi. Dalam konteks restitusi uang hasil korupsi, tampaknya aturan yang tercantum dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 mengenai tindak korupsi dinilai kurang memadai. Alasan tertentu, seperti pelaku lebih memilih hukuman atau kurungan daripada restitusi uang. Oleh karena itu, perlu direkonstruksi penegakan hukum di Indonesia dengan mengatur secara komprehensif mengenai hasil tindak pidana korupsi yang terkandung dalam undang-undang yang terintegrasi dengan pengaturan lainnya untuk memastikan efektivitas pelaksanaan hukum dan memberikan perlindungan serta jaminan hukum terhadap masyarakat.

⁹Dalam konteks restitusi uang hasil korupsi termasuk dalam mengatasi pemberantasan tindak pidana korupsi dinilai kurang memadai. Seringkali sulit diterapkan seperti pelaku lebih tercondong hukuman atau kurungan daripada restitusi uang. Oleh sebab itu perlu melakukan direkonstruksi sistem hukum pidana di Indonesia

jenis-jenis tindak pidana korupsi yang dapat ditegakkan diantaranya:

A. Pidana mati dapat dijatuhkan dalam kondisi tertentu, seperti saat negara dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan nasional atau saat terjadi krisis ekonomi yang serius.

B. pidana penjara dengan jangka waktu tertentu dan atau denda dapat dijatuhkan terhadap pelaku korupsi yang melakukan perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan negara. Pidana juga dapat diberikan kepada mereka yang menggunakan kekuasaan atau kedudukan untuk merugikan keuangan negara. Denda yang diberikan dapat mencapai maksimum 1/3 dari nilai kerugian. Proses penjatuhan hukuman yang mencakup tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan pengurusnya serta tindakan pidana korupsi yang dilakukan dalam lingkungan korporasi baik secara individu maupun bersama-sama.

UU Nomor 31 Tahun 1999, berbagai tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan terhadap terdakwa mencakup hal-hal berikut:

⁹ Penegakan hukum berdasarkan perspektif UU NO 31 TAHUN 1999

A. Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa pidana mati hanya dapat diberlakukan dalam kondisi tertentu, seperti bencana alam nasional berulang atau saat negara mengalami krisis ekonomi serius.

B. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 mengatur pidana penjara seumur hidup atau dengan durasi tertentu serta denda bagi pelaku yang melakukan tindakan melawan hukum, memperkaya diri, atau merugikan keuangan negara. Selain itu, Pasal 3 juga mencakup pidana penjara seumur hidup atau minimal 1 tahun beserta denda bagi pelaku yang menyalahgunakan jabatan, kewenangan Pasal 5 juga menetapkan pidana penjara minimal 1 tahun hingga 5 tahun beserta denda bagi pelaku tindak pidana tertentu yang dijelaskan dalam Pasal 209.¹⁰

Meskipun demikian, terdapat catatan yang tidak optimal dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia. Dari 857 kasus yang dipantau, hampir separuh terdakwa (49,57%) divonis bebas atau lepas, sementara hanya 50,43% yang divonis bersalah. Hal ini menunjukkan tren vonis yang cenderung ringan, bahkan pada batas minimal yang ditetapkan UU Korupsi.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, beberapa langkah dapat dilakukan, seperti memperbaiki sistem pengadilan dan pemberantasan korupsi, meningkatkan kemampuan para hakim dan jaksa, memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian korupsi, serta memperkuat kemampuan para pemberantas dan pengawas korupsi. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan penegakan hukum korupsi di Indonesia dapat lebih memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

pemberantasan korupsi seringkali dihadapi oleh kendala- seperti ketidaktegasan dalam aturan peralihan yang tidak diatur dengan jelas, dalam Hal ini memunculkan berbagai penafsiran dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mempertahankan status quo dan menghindari penuntutan terhadap pelaku korupsi yang melanggar, Meskipun ada upaya positif dalam pemberantasan korupsi, tetapi dengan adanya ketidakjelasan dalam substansi peraturan menyiratkan adanya kesulitan dalam menegakkan hukum korupsi secara tuntas. Hal ini terlihat dari kasus nyata di mana terjadi kesulitan dalam menuntut hakim Mahkamah Agung yang diduga melakukan korupsi karena adanya perubahan hukum dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 ke Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang tidak diberikan ketentuan peralihan yang jelas. masih berlaku. Walaupun demikian, terjadi perdebatan tentang ketidakjelasan aturan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mencerminkan ketidakpastian di era transisi ini di antara pihak yang ingin memberantas korupsi.

Upaya memerangi korupsi terus dilakukan tanpa mengenal mundur. Berbagai hambatan dihadapi, namun upaya untuk menciptakan instrumen hukum yang lebih efektif juga dilakukan secara serius.

Sesuai dengan menunjukkan keseriusan dalam penegakan hukum terhadap korupsi. KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memberikan dampak signifikan dalam penindakan terhadap pelaku korupsi.

Apabila dianalisis berdasarkan unsur-unsur terdapat unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif mengacu pada setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menghalangi proses hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. dalam tindak pidana korupsi seharusnya mencakup pelaku dan pihak-pihak yang berhubungan dalam proses hukum, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai subjek hukum dalam kasus ini.

Permasalahan juga muncul terkait dengan asas self incrimination, di mana seorang tersangka memiliki hak untuk tidak memberikan keterangan yang dapat membuktikan kesalahannya. Hal ini berkaitan dengan prinsip bahwa tersangka tidak harus memberikan keterangan yang memberatkan dirinya, yang tercermin dalam Pasal 117 KUHP.

Sementara itu, schuld atau kesalahan dalam konteks ini terkait dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, di mana pelaku memiliki kesadaran dan kehendak untuk menghalangi proses hukum. Dalam konteks obstruction of justice, cukup bahwa pelaku mengetahui bahwa

¹⁰ Penegakkan hukum berdasarkan perspektif uu nomor 31 tahun 1999

tindakannya dapat menghalangi proses hukum, tanpa harus membuktikan niat pelaku untuk menghalangi proses hukum.

11

Dalam penegakan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur objektif menurut Satochid Kertanegara mencakup perbuatan, akibat, dan masalah. Perbuatan tersebut mengacu pada tindakan mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung. Dalam prakteknya, perbuatan tersebut haruslah dapat dibuktikan sebagai tindakan konkret yang melanggar hukum. Pasal 21 tersebut juga mengenali percobaan perbuatan yang diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 14, dan penjelasan dalam Pasal 15 mengurangi ancaman pidana pada percobaan tindak pidana secara umum. Permulaan tindakan atau persiapan dalam suatu perbuatan adalah langkah awal sebelum terjadinya perbuatan, dan dalam konteks tindak pidana korupsi, tindakan ini dapat dianggap sebagai percobaan tindak pidana korupsi.

Dalam formulasi perbuatan/ tindak pidana, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu;. Perbuatan mencegah, merintang, dan menggagalkan harus memiliki unsur perbuatan yang melanggar hukum, dilakukan dengan kesadaran dan kemauan, serta harus terkait dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang.

Kriteria perbuatan menghalangi proses peradilan meliputi tindakan yang membuat proses peradilan tidak dapat dilaksanakan, mempersulit tindakan yang akan dilakukan, atau membuat suatu tindakan menjadi kegagalan. Dalam Pasal 21 tersebut, perbuatan mencegah, merintang, dan menggagalkan termasuk dalam delik formil yang dianggap selesai tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatan tersebut. Cukup dengan melakukan perbuatan yang dapat menghalangi atau menggagalkan proses penyelidikan dan pemeriksaan dalam sidang

Dalam konteks penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi, kebijakan dianggap sebagai kesatuan yang penting.¹²

Dalam ketentuan ini, kewenangan diberikan kepada lembaga kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, sebagaimana yang diatur dalam beberapa undang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

Ketentuan di atas menunjukkan penerapan prinsip hukum *lex specialis derogat legi generalis*, mengesampingkan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang umum seperti KUHAP. Namun, jika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 memberikan ketentuan yang berbeda, maka KUHAP tidak berlaku. Ini adalah salah satu contoh penggunaan prinsip hukum *lex specialis derogat legi generalis*.

Dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa pentingnya integritas antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk menciptakan harmoni dalam penegakan hukum. Meskipun ketiga lembaga tersebut memiliki kewenangan yang berbeda-beda, landasan hukum yang mengaturnya tetap berasal dari Undang-Undang. Namun, dalam praktiknya, KPK sebagai lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi kadang-kadang mengambil alih fungsi kepolisian dan kejaksaan dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus-kasus korupsi tertentu. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat pasal-pasal yang menyatakan tindakan-tindakan yang dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp. 200.000.000,00 dan maksimal Rp. 1.000.000.000,00. Pasal-pasal ini juga menyebutkan adanya pidana mati dalam situasi tertentu. Pelanggaran terhadap keuangan negara dianggap sebagai tindak pidana, tetapi pengertian ini dapat dipandang berbeda tergantung pada sudut pandang hukum yang digunakan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kebingungan dalam penegakan hukum terutama terkait dengan korupsi.

¹¹ Penegakan hukum berdasarkan perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999

¹² Penegakan hukum korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999

dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan mengenai hukuman penjara atau denda atas pelanggaran semacam itu harus diinterpretasikan secara spesifik terhadap pejabat publik, dan tidak boleh diterapkan pada pemahaman jabatan dalam konteks struktur keperdataan. Tindakan korupsi juga berhubungan dengan kerugian hak-hak asasi masyarakat dan dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius.

Penetapan pidana mati sebagai bagian dari strategi penanggulangan kejahatan adalah sebuah keputusan kebijakan yang dapat memicu beragam reaksi. Penentuan kebijakan ini memperoleh respon yang berbeda dari masyarakat, baik yang mendukung maupun yang tidak setuju. Namun, yang terpenting dari sebuah kebijakan adalah dampaknya terhadap masyarakat dan efektivitasnya dalam menekan tingkat kejahatan, sesuai dengan tujuan awal pembuatan kebijakan tersebut. Beberapa tantangan yang mungkin muncul dalam penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, menurut Bambang Poernomo, antara lain perbedaan pendekatan dalam mengevaluasi hasil pemeriksaan, persepsi dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta situasi sosial dan politik daerah yang kurang mendukung. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dapat meliputi ¹³ pencabutan tertentu pada terpidana, penyitaan barang bukti terkait dengan tindak pidana, pemiskinan koruptor melalui denda, dan perlunya peran aktif pemerintah dan lembaga legislator dalam menegakkan kebijakan tersebut¹⁴

Pentingnya peran tindak pidana korupsi dalam mengubah paradigma kejahatan kriminal sangatlah minimal, terutama dalam konteks penghapusan regulasi dan kebijakan yang ada. Dalam beberapa kasus, rekodifikasi dan penghapusan pasal-pasal yang ada malah mengurangi efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi, sehingga memberikan manfaat yang sangat terbatas bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengubah perilaku penyimpangan pidana korupsi menjadi biasa yang setara dengan delik konvensional, implikasi hukumnya adalah kehilangan spesialisasi dalam kewenangan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, yang dapat mengurangi efektivitas mereka dalam melaksanakan tugas penegakan hukum terkait korupsi.

Sistem pemberlakuan beban pembuktian yang berimbang, ancaman pidana dengan sistem minimum khusus, pengaturan tentang penyidikan gabungan, penyidikan rahasia bank yang lebih luas, peran serta masyarakat sebagai kontrol sosial, pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang penanganan gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi, penerapan sistem dan perluasan sumber alat bukti dari informasi elektronik. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mencegah dan termasuk pembentukan dan pembaharuan undang-undang, kerjasama dengan lembaga negara lainnya, dan pengeluaran kebijakan, Langkah-langkah konkret yang diambil meliputi optimalisasi upaya penyidikan dan penuntutan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, dan peningkatan kerjasama antara lembaga yang berwenang

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi membutuhkan tenaga sinergi antara aparat penegak hukum untuk mencegah dan menurunkan pidana korupsi yang semakin merajalela di masyarakat. Dengan adanya landasan hukum yang kuat untuk menangani kasus korupsi merupakan langkah pertama yang positif dalam penegakan hukum dalam penindakan pidana korupsi.

Upaya pemerintah dalam melakukan pembaharuan peraturan dan kebijakan terkait pemberantasan korupsi sesuai dengan urgensi kasus yang semakin meningkat menjadi tindakan yang tepat. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan pemberantasan korupsi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan pilihan pidana tambahan kepada terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, seperti

¹³ Penegakan hukum korupsi perspektif UU NOMOR 31 TAHUN 1999

¹⁴ Penegakan hukum korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999

perampasan barang bukti korupsi, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan untuk sementara, pencabutan hak tertentu, atau penghapusan keuntungan tertentu yang diberikan oleh pemerintah. Jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk membayar uang tersebut, atau jika tidak ada harta yang cukup, terpidana dapat dipenjaras sesuai dengan pidana pokok yang telah ditetapkan.¹⁵

Peradilan tindak pidana korupsi melibatkan penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang dianggap sebagai turunan tindak pidana korupsi. Ini mencerminkan hubungan yang erat antara kedua konsep ini, di mana peradilan tindak pidana korupsi berfokus pada penanganan kasus-kasus yang melanggar ketentuan. Hal ini tercermin dalam kriteria-kriteria pelanggaran seperti mencegah, merintang, dan menggagalkan proses peradilan korupsi, yang menunjukkan usaha pelaku untuk menghalangi jalannya proses hukum terkait kasus korupsi, berbagai jenis tindak pidana korupsi dapat disanksi dengan pidana penjara mulai dari 1 tahun hingga 20 tahun. Tindak korupsi tersebut mencakup sejumlah aktivitas seperti pengadaan kontrak, pengelolaan hutang, aset dan kewangan, perizinan, kegiatan keuangan, perkebunan, perdagangan, industri, transportasi, komunikasi, perumahan, pendidikan, hubungan antar daerah, perlindungan lingkungan, serta keamanan.

Faktor-faktor yang harus ditegakkan untuk tindak pidana korupsi mencakup penerimaan hadiah atau janji oleh pelaku korupsi untuk keuntungan pribadi, menghalangi penyidikan, memberikan keterangan palsu, membuat laporan palsu, atau melakukan penarikan atau penghancuran barang negara. Pidana bagi pelaku korupsi yang terbukti bersalah berkisar antara 1 hingga 20 tahun penjara.

Penegakan hukum korupsi yang dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, dengan tujuan mengurangi dan membasmi tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam konteks ini, UU tersebut memberikan landasan hukum untuk menindak dan menghukum para pelaku korupsi yang terbukti bersalah, dengan rentang hukuman yang telah diatur dalam pasal-pasal. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur prosedur penegakan hukum terkait korupsi di Indonesia. UU ini mencakup aspek pemberantasan tindak pidana korupsi, fungsi pengadilan tindak pidana korupsi, dan upaya pemberantasan korupsi di masyarakat. Selain itu, informasi terkait pengadilan tindak pidana korupsi dan perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 juga tersedia dalam berbagai sumber seperti Database Peraturan BPK.

¹⁶ Penegakan hukum korupsi di Indonesia ini memuat ketentuan-ketentuan terkait pemberantasan korupsi, proses pengadilan terhadap kasus korupsi, dan upaya pemberantasan korupsi dalam masyarakat. Beberapa aspek yang tercakup dalam UU ini meliputi langkah-langkah yang diperbolehkan untuk menangani korupsi dan penyediaan kerangka hukum yang relevan dengan tujuan pemberantasan korupsi. Selain itu, informasi terkait pemberantasan korupsi juga dapat ditemukan dalam berbagai sumber seperti Database Peraturan BPK.

¹⁷

Pentingnya penegakan hukum tindak pidana korupsi tercermin dalam kewajiban menegakan hukum oleh Lembaga seperti KPK yang bertugas mengatur tindakan korupsi dan menangani kasus-kasus korupsi. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum korupsi masih belum optimal dan terdapat faktor-faktor penghambat seperti intervensi politik, inkonsistensi dalam penanganan kasus, dan kekurangan sarana dan budaya anti-korupsi dalam masyarakat. Mendapatkan informasi lebih lanjut tentang penegakan hukum korupsi di Indonesia

¹⁵ Penegakan hukum korupsi berdasarkan perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999

¹⁶ Penegakan hukum korupsi perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999

¹⁷ Penegakan hukum korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999

dapat dilakukan melalui sumber-sumber seperti jurnal ilmiah hukum dan laporan tentang hukum di Indonesia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan penyimpangan perilaku korupsi di Indonesia bervariasi, mulai dari keserakahan, kesempatan, kebutuhan, pengungkapan, hingga faktor eksternal seperti intervensi pemerintah dan kekurangan moral. Faktor-faktor tersebut memperlihatkan kompleksitas dalam penegakan hukum dan pencegahan korupsi di Indonesia, yang memerlukan perhatian lebih dalam pengembangan kebijakan dan upaya anti-korupsi.

Dampak negatif dari tindak korupsi di Indonesia dapat meningkatkan kekurangan keadilan dalam berbagai aspek, seperti kekurangan penegakan hukum, kekurangan ketuhanan, kekurangan budaya, kekurangan moral, dan kekurangan transparansi.

Berbagai Tindakan telah dilakukan untuk menurunkan kasus perilaku penyimpangan korupsi yang terjadi, contohnya dalam gerakan "moral" yang menegaskan korupsi adalah tindakan yang merugikan bagi kemanusiaan, penguatan kapasitas badan anti korupsi, upaya penyelidikan, penuntutan, dan pengawasan yang efektif terhadap kasus korupsi, penguatan sistem hukum, serta upaya pencegahan korupsi melalui berbagai lembaga dan lapisan masyarakat. Lembaga pendidikan dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi tindak pidana korupsi di Indonesia dengan mengedukasi berbagai pihak, seperti generasi muda, guru, siswa, komunitas, lembaga pendidikan, pihak swasta, pihak pemerintah, kepolisian, kejaksaan, KPK, dan pihak hukum, tentang perilaku anti korupsi dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap tindak pidana korupsi. Semua upaya ini diharapkan dapat membantu mengurangi kasus korupsi di negara kita.

Di bawah ini terdapat beberapa peraturan yang harus dipatuhi dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999:

1. Proses penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan dilakukan berdasarkan peraturan hukum acara pidana yang berlaku serta UU Nomor 31 Tahun 1999 (Pasal 26).
2. Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan untuk kasus tindak pidana korupsi harus diberikan prioritas penyelesaiannya dibandingkan dengan perkara lain (Pasal 25).
3. Penerapan sistem pembuktian terbalik murni terhadap tindak pidana gratifikasi dan harta benda terdakwa yang belum didakwa (Pasal 12 B ayat (1) dan Pasal 38 B).
4. Pidana pokok yang bisa dijatuhkan kepada korporasi hanya berupa pidana denda dengan tambahan maksimum 1/3 (Pasal 18 ayat (3)).
5. Pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana terdapat dalam Pasal 20 UU Nomor 31 Tahun 1999.
6. Hakim tidak diperbolehkan memberikan pidana kepada seseorang, kecuali jika terdapat minimal dua bukti yang sah yang menunjukkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah (Pasal 183 KUHP)
7. Jika tindak pidana korupsi tidak sejalan dengan penghasilan atau penambahannya, keterangan yang diberikan dapat memperkuat bukti yang ada terhadap terdakwa (Pasal 43 A). Semua aturan tersebut harus dijalankan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terkandung dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dengan mengacu pada beberapa pasal dan ketentuan yang harus ditaati. Berikut adalah beberapa

ketentuan yang harus dipatuhi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU 31/1999. Pasal-pasal tersebut menetapkan prosedur hukum yang harus diikuti. Salah satu hal yang ditekankan adalah pentingnya prioritas dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi dibandingkan dengan perkara lain. Selain itu, UU ini juga menegaskan tentang penerapan sistem pembuktian terbalik dalam kasus-kasus tertentu dan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Pasal-pasal ini memberikan dasar hukum bagi Lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) untuk melakukan tugasnya untuk mengawasi, memonitor, menyidik, menuntut, dan memeriksa kasus-kasus korupsi.

Proses pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU 31/1999) mengikuti serangkaian tahapan yang harus dijalani secara berurutan:

18

1. Penyidikan: Tahap penyidikan dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan UU 31/1999, bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menggambarkan peristiwa yang terjadi.
2. Penuntutan: Tahap penuntutan dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dan UU 31/1999, dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.
3. Pemeriksaan di sidang pengadilan: Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum pidana yang berlaku, kecuali jika diatur berbeda dalam undang-undang.
4. Pengadilan terkadin: Proses pengadilan tindak pidana korupsi bisa dilakukan melalui pengadilan terkadin yang berlaku di dalam atau di luar negeri.
5. Penyelenggara Negara: Penyelenggara Negara diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
6. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK): KPK dibentuk untuk melakukan tindakan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi.
7. Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pembentukan undang-undang KPK didasarkan pada pertimbangan yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut.

19

8. Pasal- Pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999: Terdapat sejumlah pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dalam UU tersebut, seperti Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12.

Tahapan-tahapan ini harus diikuti dengan cermat dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan UU 31/1999

Dengan kemungkinan penjatuhan hukuman pada itu sendiri serta pengurusnya. Tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam korporasi bisa dilakukan oleh individu-individu dalam lingkup kerja atau hubungan lain di dalam korporasi, baik secara individu maupun kolaboratif. Korporasi memiliki kewenangan untuk diwakili oleh pengurusnya dalam proses hukum, termasuk memberikan kuasa kepada individu lain. Dalam persidangan, hakim berwenang untuk memerintahkan pemimpin korporasi untuk hadir di pengadilan atau menghadapkan pengurus korporasi tersebut.

Aturan gugatan perdata untuk perampasan aset menjadi krusial dengan tanpa aturan tersebut, upaya penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi tidak mungkin dilaksanakan. Meskipun terdapat perbedaan antara mekanisme perdata dan pidana. Meski mekanisme perdata memberikan keuntungan seperti kemampuan untuk mengajukan gugatan meskipun pelaku sudah meninggal dunia, namun sistem pembuktian formil yang diterapkan dalam proses perdata

¹⁸ Penegakan hukum korupsi berdasarkan perspektif UU Nomor 31 tahun 1999.

¹⁹ Penegakan hukum korupsi berdasarkan perspektif UU Nomor 31 tahun 1999

dapat menjadi kendala yang sulit diatasi. Sehingga, diperlukan perubahan kebijakan hukum untuk meningkatkan efektivitas upaya memulihkan kerugian keuangan negara dan ekonomi²⁰

KESIMPULAN

Kejahatan penyimpangan sikap korupsi semakin luas juga bertambah di Indonesia, terlihat dari berbagai kasus yang ditangani oleh lembaga penegak hukum. Meskipun ada upaya untuk memberantasnya, perkembangan modus operandi dalam tindak pidana korupsi terus mengalami

²⁰ Penegakan korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999

perubahan drastis. Dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat yang harus menanggung akibat dari tindak pidana korupsi. Meskipun sanksi pidana berupa penyitaan hasil korupsi diatur dalam undang-undang, hal tersebut tidak selalu membuat koruptor menjadi miskin karena hanya aset yang terkait langsung dengan korupsi yang dirampas. Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan kepercayaan public. Dalam menentukan adanya korupsi, digunakan beberapa metode perhitungan keuangan negara. Hal ini membantu dalam menentukan sanksi yang sesuai

DAFTAR PUSTAKA

Undang Nomor 31 tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Buku berjudul "Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia" oleh Chazawi Adami diterbitkan pada tahun 2016 oleh Penerbit Rajawali Pers di Jakarta.

Penerbit Kemendikbud menerbitkan buku "Pendidikan Anti Korupsi" oleh Tim Penulis Buku pada tahun 2011 di Jakarta.

Pada tahun 2012, PT.Raja Grafindo Persada menerbitkan buku "Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)" yang ditulis oleh Daniel, Elwi di Jakarta.

Artikel berjudul "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa" oleh Ifrani diterbitkan pada tahun 2017 di IX Al'Adl.

Buku "Korupsi dalam Hukum Pidana Islam" yang ditulis oleh Nurul Irfan diterbitkan oleh Amzah pada tahun 2011 di Jakarta.

"Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam" oleh H.Ahmad Warsi Muslich diterbitkan oleh Sinar Grafika pada tahun 2006 di Jakarta.